

RINGKASAN

Implementasi Dana Kelurahan yang ada Di Kabupaten Cilacap yang kurang mengedepankan prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu transparan, adil, bertanggung jawab, efektif, efisien, berhati – hati, kemandirian, integritas dan good corporate governance perlu mendapat perhatian khusus dari pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Cilacap. Ketidakjelasan aturan yang mengatur Dana Kelurahan, peran Lurah dalam melaksanakan Sistem Pengendali Intern Pemerintah (SPIP) yang sangat lemah dan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) selaku kelompok masyarakat yang melaksanakan Kegiatan Sarana dan Prasarana dan Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan yang kurang memahami aturan petunjuk teknis pelaksanaan menjadi penyebab temuan review hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh Inspektorat Kabupaten Cilacap.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui permasalahan implementasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Alokasi Dana Kelurahan di Kabupaten Cilacap. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut peneliti mengelompokan aktor yang terlibat pada Dana Kelurahan di Kabupaten Cilacap yaitu Tim Fasilitasi Dana Kelurahan dan Pelaksana Dana Kelurahan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi dan metode content identification terhadap bahan – bahan yang akan diteliti.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa temuan review hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dari Inspektorat Kabupaten Cilacap dan lemahnya tata pemerintahan di Kabupaten Cilacap menjadi bukti pelaksanaan Dana Kelurahan di Kabupaten Cilacap tidak cukup baik. Kelurahan diharapkan melaksanakan rekomendasi dan tindaklanjut review hasil PDTT dari Inspektorat Kabupaten Cilacap dengan lebih meningkatkan pemahaman tentang Sistem Pengendali Intern Pemerintah (SPIP), penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dengan baik. Perlunya pendampingan (pembinaan dan pengawasan) yang intensif dan masif dari Tim Fasilitasi Dana Kelurahan kepada Pelaksana Dana Kelurahan dengan mengedepankan prinsip – prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Disamping itu perlunya kejelasan peraturan yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Dana Kelurahan di Kabupaten Cilacap sehingga permasalahan terkait dengan Dana Kelurahan tidak terjadi lagi pada kemudian hari.

Kata kunci : dana kelurahan, pengadaan barang dan jasa pemerintah.

SUMMARY

The implementation of Village Funds in Cilacap Regency which does not prioritize the principles of Government Procurement of Goods and Services, namely transparency, fairness, responsibility, effectiveness, efficiency, caution, independence, integrity and good corporate governance needs special attention from stakeholders in Cilacap Regency. The lack of clarity in the rules governing Kelurahan Funds, the role of Lurah in implementing the Government Internal Control System (SPIP) which is very weak and the role of Kelurahan Community Empowerment Institutions (LPMK) as community groups that carry out Facilities and Infrastructure Activities and Empowerment Activities in Kelurahan who do not understand technical guidelines implementation is the cause of the findings of a review of the results of Examination with a Specific Purpose (PDTT) by the Cilacap District Inspectorate.

The purpose of this research is to find out the problems with the implementation of the Procurement of Goods and Services in the Allocation of Village Funds in Cilacap Regency. To identify these problems, the researcher grouped the actors involved in the Kelurahan Fund in Cilacap Regency, namely the Kelurahan Fund Facilitation Team and Kelurahan Fund Executors. This study used interview and observation methods and content identification methods for the materials to be studied.

The results of the study concluded that the findings of a review on the results of an Examination with a Specific Purpose (PDTT) from the Inspectorate of the Cilacap Regency and the weak governance in the Cilacap Regency are evidence that the implementation of Village Funds in the Cilacap Regency is not good enough. Kelurahans are expected to carry out recommendations and follow up on the review of PDTT results from the Cilacap Regency Inspectorate by further increasing understanding of the Government Internal Control System (SPIP), administration and accountability for managing state finances properly. The need for intensive and massive assistance (guidance and supervision) from the Kelurahan Fund Facilitation Team to the Village Fund Executor by prioritizing the principles of Government Procurement of Goods and Services.

Keywords: sub-district fund, procurement of government goods and services.